



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 12 April 2017

Halaman: 2

LIBATKAN KEMENPAN RB Mekanisme Pemberian Tunjangan Diperketat

YOGYA (KR) - Mekanisme penilaian sebagai syarat pemberian tunjangan pegawai, khususnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Pemkot Yogya bakal diperketat. Hal ini seiring perombakan sistem evaluasi jabatan yang tengah dilakukan Pemkot dengan melibatkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogya Kris Sarjono Sutejo mengungkapkan, sejak 2011 lalu Pemkot Yogya sebenarnya sudah menerapkan evaluasi jabatan secara berkala. Hanya sejak saat itu belum mendapatkan pengarahannya secara langsung dari Kemenpan RB. "Mulai tahun ini kami undang Kemenpan RB untuk

mendampingi sekaligus mengoreksi sistem evaluasi jabatan yang hendak dibangun," ungkapnya di sela workshop reformasi birokrasi di kompleks Balaikota Yogya, Senin (10/4).

Evaluasi jabatan, imbuh Kris Sarjono, idealnya selalu mengalami perubahan. Sehingga Pemkot berupaya merombak sistem sesuai basis kinerja, kemudian dimintakan koreksi ke Kemenpan RB. Hasil koreksi tersebut kelak akan diberlakukan sebagai dasar pemberian TPP yang baru.

Hingga saat ini, pemberian TPP masih mengacu pada ukuran jabatan pegawai serta belum sepenuhnya berbasis kinerja. Dengan mekanisme yang baru, selain mempertimbangkan jabatan dan kedudukan pegawai, beban kerja juga turut menen-

tukan. "Bisa jadi dengan mekanisme yang baru nanti, jumlah TPP yang akan diterima oleh pegawai akan bertambah atau justru berkurang. Saat ini kan ukurannya belum maksimal," tandasnya.

Kris Sarjono memaparkan, dalam evaluasi jabatan setiap kedudukan akan diukur beban kerjanya. Kemudian, masing-masing beban kerja tersebut akan dijabarkan dalam uraian pekerjaan dengan target yang jelas. Bahkan, target kinerja itu bakal ditetapkan hingga satuan hari.

Oleh karena itu, bagi pegawai yang tidak mampu menyelesaikan kinerja sesuai target akan berpengaruh pada penilaian. Dengan begitu, semua jenis pekerjaan bisa semakin terukur dan sistematis. Sehingga, pegawai dengan

kedudukan yang lebih tinggi belum menjadi jaminan bakal menerima TPP yang lebih besar. "Penyerapan anggaran juga akan dinilai, termasuk disiplin pegawai. Kalau penyerapannya rendah dan disiplin pegawai bermasalah, jangan harap mendapatkan TPP yang seperti kemarin," jelas Kris Sarjono.

Selain itu, semua penilaian juga akan dilakukan melalui sistem yang tengah digagas oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian. Hal ini guna menghindari kesalahan sekaligus mengedepankan transparansi. Ditargetkan, mulai 2018 mendatang, sistem baru dalam pemberian TPP tersebut sudah dapat diberlakukan.

(Dhi-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005